



## Disayangkan, Lahan Pemerintah Dikomersialkan

Denpasar (Bali Post) -

Denpasar selama ini masih kekurangan kawasan ruang terbuka hijau kota (RTHK). Mengingat, lahan yang dijadikan RTHK merupakan hak milik. Sayangnya, lahan kosong yang dimiliki pemerintah, justru dikomersialkan. Seperti yang terjadi di kawasan Jalan Tantular, Renon, tepatnya di depan Bank Indonesia (BI). Kondisi ini sangat ironis di tengah krisis RTHK.

Atas kondisi ini, anggota DPRD Kota Denpasar memberi perhatian serius terhadap keberadaan lahan-lahan (kosong) milik pemerintah ini. Lahan milik pemerintah itu diharapkan ditata sedemikian rupa untuk hutan kota atau pertamanan sehingga bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. "Kami sangat menyayangkan ada pembangunan di lahan pemerintah di Jalan Tantular," ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Denpasar Eko Supriadi dan A.A. Susruta Ngurah Putra, Selasa (31/3) kemarin.

Hal ini mereka sampaikan, menyikapi adanya dugaan sejumlah lahan terutama milik Prmprov Bali yang saat ini dibangun untuk kepentingan berorientasi keuntungan. Sebab, ditengarai pembangunan tersebut hendak dikomersialkan/dikontrakkan. "Saya melihat ada kecenderungan pembangunan di lahan milik Pemprov seperti di depan BI (Bank Indonesia) di Jalan Tantular itu akan dikontrakkan, karena bangunannya mirip toko," jelas Susruta Ngurah Putra dibenarkan rekannya, I Gede Semara, Wayan Warka, Nyoman Darsa serta Nyoman

Karisantika.

Susruta menilai pembangunan seperti itu akan menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat. Selama ini masyarakat selalu ditekan untuk mempertahankan lahannya untuk kepentingan jalur hijau. Sementara pemerintah justru membangun di lahannya untuk kepentingan komersial. "Mestinya pemerintah memanfaatkan lahan negara untuk dijadikan hutan kota atau pertamanan," tandas Susruta.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Denpasar ini juga mengingatkan agar pemanfaatan lahan tetap mengacu pada kepentingan lebih luas. "Jika dibangun untuk kepentingan komersial, jelas ini tidak adil. Kita harus tetap berpihak pada kepentingan rakyat," tandas Susruta seraya menyebut, pembangunan yang sama saat ini juga terdapat di seputaran bundaran Renon. "Bangunan tersebut sarat kepentingan komersial," tandas Susruta.

Politisi PDI Perjuangan asal Kesiman Kertalangu, Wayan Warka, menambahkan lahan milik pemerintah di bilangan Tohpati yang sempat dimohonkan untuk pembangunan sekolah, justru tidak dapat direalisasikan. Padahal, Kota Denpasar khususnya Denpasar Timur masih memerlukan lahan untuk dibangun sekolah. Mengingat, Denpasar masih kekurangan sekolah. "Saya sangat setuju dan mendukung jika lahan kosong milik pemerintah ditata menjadi pertamanan atau dibangun sekolah untuk kepentingan masyarakat luas," imbuh Warka. (kmb12)

Edisi : Rabu, 1 April 2014

Hal : 2



**Eks Galian C Gunaksa**

# Lahan Estuaridam Milik Pemkab Tak Jelas

Semarapura (Bali Post) -

Di kawasan eks galian C Gunaksa ada sekitar 24 hektar lahan yang telah dibebaskan Pemkab Klungkung untuk proyek estuaridam. Lahan milik warga ini pun telah diganti rugi oleh Pemkab. Sayangnya lahan yang telah dibebaskan ini ternyata tidak jelas batas-batasnya padahal lahan telah diganti rugi Rp 8 juta/are.

Anggota DPRD Klungkung Wayan Mastra, Selasa (31/3) kemarin mengakui adanya pembebasan lahan di kawasan eks galian C. Pembebasan lahan di eks galian C inipun, kata Mastra dilakukan zaman Bupati Tjokorda Gde Ngurah. "Lahan yang dibebaskan saat itu sekitar 24 hektar. Semua lahan yang dibebaskan Pemkab ini merupakan lahan milik warga. Bahkan warga saat itu menerima ganti rugi sebesar Rp 8 juta per are," jelasnya.

Ia mengatakan saat pembebasan lahan tersebut, ia sebagai Ketua Komisi C sehingga tahu proses pembebasan lahan tersebut. Menurutnya lahan warga yang dibebaskan tersebut rencananya diperuntukan untuk proyek estuaridam. Namun, proyek ini tidak dilanjutkan karena anggota DPRD saat itu tidak setuju pembangunan kantor estuaridam dibangun di Denpasar.

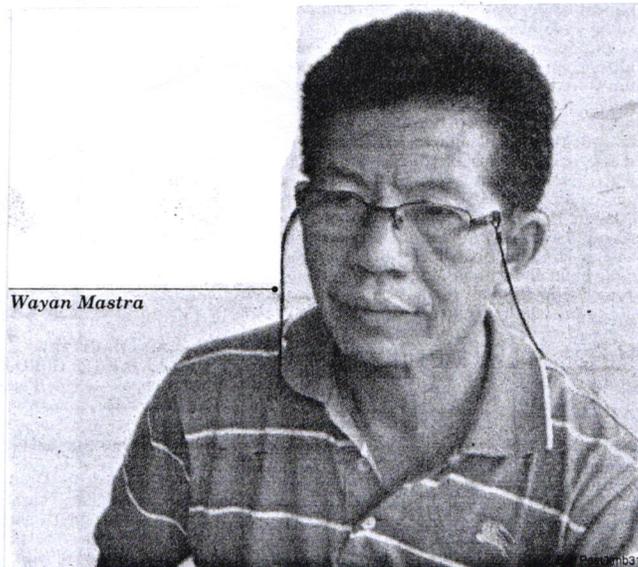
Politisi asal Desa Tangkas ini mengatakan, proses pembebasan lahan di kawasan eks galian C sudah dilakukan. Bahkan warga sudah mendapat ganti rugi sebesar Rp 8

juta per are. Dengan adanya pembebasan ini, Mastra maupun anggota DPRD, AA Gde Bagus berharap Pemkab bisa mengamankan aset milik Pemkab tersebut di eks galian C. "Jangan sampai dipakai main mata oleh oknum tertentu. Jika sampai Pemkab belum mengajukan proses pensertifikatannya ke Kantor BPN maka itu konyol," kritiknya.

Terkait lahan ini, Pemkab Klungkung ternyata tidak mengetahui adanya aset milik Pemkab di kawasan eks galian C. Kabag Perengkapan Ketut Sena dikonfirmasi kemarin mengakui kalau tidak ada lahan di kawasan eks galian C yang tercatat sebagai aset Pemkab. Sepengetahuannya, aset Pemkab berupa lahan ada di beberapa tempat. Salah satunya terdapat di Desa Pesinggahan seluas 39 are. Aset Pemkab di Desa Pesinggahan inipun sudah ada sertifikatnya di Dinas PPK Klungkung. Bahkan rencananya akan dibangun dermaga untuk pelabuhan boat.

Selain di Pesinggahan, menurut Sena aset Pemkab juga ada di Subak Gelgel seluas 40 are. Lahan milik Pemkab inipun

juga sudah disertifikatkan di Dinas Perhubungan Klungkung. Rencananya lahan menuju pantai Watu Klotok ini juga mau dipakai tempat uji kendaraan bermotor. Tapi karena masuk jalur hijau, lahan tersebut dipakai untuk pengembangan pertanian. (kmb)



Wayan Mastra

Edisi : Rabu, 1 April 2015

Hal : 16



## Irigasi Subak Jatiluwiuh Jebol

Tabanan (Bali Post) -

Saluran irigasi di subak di Jatiluwiuh kembali jebol. Sebelumnya saluran irigasi di subak ini juga jebol sepanjang 40 meter dan hingga kini belum diperbaiki. Kini, lokasi jebolnya saluran irigasi berbeda dengan lokasi sebelumnya.

Salah satu pengurus Subak Jatiluwiuh, Wayan Semarajaya memaparkan selama ini titik-titik yang jebol ditutup dengan karung. Hal yang sama juga dilakukan subak setempat. "Untuk sementara jebolnya irigasi sepanjang 3 meter ini ditambal menggunakan karung berisi tanah. Upaya itu dilakukan petani setempat supaya air yang datang dari hulu bisa mengalir," ujarnya.

Semarajaya mengatakan saluran irigasi tersebut jebol pada Senin (30/3) kemarin. Petani hanya bisa melakukan penambalan dengan karung berisi tanah. Padahal saat ini areal persawahan di Jatiluwiuh sangat membutuhkan air. "Umur padi di Jatiluwiuh

sedang membutuhkan air. Kami khawatir jebolnya saluran irigasi berdampak pada pertumbuhan tanaman padi kami," ujarnya.

Pihaknya mengatakan subak telah melaporkan jebolnya saluran ini ke Dinas Pertanian, Tabanan. "Petugas sudah turun. Kami dijanjikan perbaikan saluran irigasi di Jatiluwiuh menjadi prioritas," jelasnya. Kawasan Jatiluwiuh yang ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia kini menghadapi banyak masalah.

Selain saluran irigasi rusak, infrastruktur jalannya juga sangat memprihatinkan. "Selain perbaikan irigasi, kami juga berharap jalan yang ada di kawasan ini diperbaiki," ujarnya. (kmb24)

Edisi : Rabu, 1 April 2015

Hal : 13



# Jalan Kedewatan - Payangan ”Benyah Latig”

## Ramai di Medsos, PU Gianyar Laporkan ke Provinsi

Gianyar (Bali Post) -

Sejak tiga hari lalu, media sosial (medsos) seperti *facebook*, dibuat ramai dengan pembicaraan mengenai ruas jalan provinsi dari Kedewatan hingga Payangan Kota yang kondisinya *benyah latig* (rusak parah) hingga sampai ditanami pohon oleh warga. Warga masyarakat pun mempertanyakan soal penanganan kerusakan jalan sepanjang Kedewatan - Payangan yang sangat lambat.

Menanggapi hal itu, pihak Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kabupaten Gianyar mengaku sudah melaporkan ke provinsi. Ramainya perbincangan di media sosial mengenai jalan rusak tersebut, rupanya juga sudah diketahui oleh Kepala Dinas PU (Pekerjaan Umum) Kabupaten Gianyar, Ida Bagus Sudewa. Selasa (31/3) kemarin, I.B. Sudewa mengatakan, bukan

saja di media sosial seperti *facebook*, dirinya juga secara langsung mendapatkan SMS dari masyarakat terhadap kondisi jalan yang rusak parah itu. Tulisan yang masuk ke SMS juga sudah diteruskan ke Kabid Bina Marga, PU Provinsi Bali. “SMS itu sudah di-forward langsung ke Kabid Bina Marga PU Bali,” katanya.

Dari keterangan pihak PU

Provinsi, I.B. Sudewa menambahkan, rencana perbaikan ruas jalan sepanjang Kedewatan hingga Payangan dilakukan tahun ini, dan kini masih dalam proses tender. Perbaikan yang akan dilakukan itu hanya sepanjang 30 meter. “Namun sebelumnya jalan rusak itu akan dilakukan penambalan,” katanya.

Kerusakan ruas jalan Kedewatan - Payangan sangat disadari oleh I.B. Sudewa. Termasuk keluhan dari masyarakat pengguna jalan. “Namun keterbatasan kewenangan dalam hal ini menjadi kendala bagi kami untuk memperbaikinya. Kami terus melakukan koordinasi dengan provinsi terkait jalan rusak itu,” katanya. (kmb16)

Edisi : Rabu, 1 April 2015

Hal : 11



## Sop Starter Mesin Pompa Rusak Pasokan Air PDAM ke Seraya Ngadat

Amlapura (Bali Post) -

Sejumlah pelanggan PDAM mengeluh karena sejak enam hari lalu, pasokan air PDAM ke Seraya dan desa lainnya ngadat. Pelanggan PDAM di Timbrah juga mengeluhkan sudah sehari-hari pasokan air PDAM ngadat. Padahal, mereka sudah rajin membayar rekening air.

Atas keluhan tersebut, Direktur PDAM Karangasem I Gede T. Baktiyasa, Selasa (31/3) kemarin di Karangasem, membenarkan macetnya air PDAM tersebut yang disebabkan sop stater mesin pompa PDAM Karangasem di Ujung Hyang, Karangasem rusak. Hal itu menyebabkan pasokan air PDAM ke Seraya terganggu dan macet. Akibatnya, se-

jumlah pelanggan di Seraya mencoba menyalasi dengan menampung air di cubang.

Hal itu dilontarkan seorang pelanggan PDAM dari Seraya Gede Sumi kemarin. Kata dia, saat ada pasokan, dia menampung air di cubang dalam volume besar, guna mengantisipasi pasokan air ke desa tandus itu saat macet. "Karena sering menampung lebih dahulu di

cubang, selama ini kami tak begitu masalah, kalau pasokan air PDAM macet," katanya. Diakui pihaknya dulu mengamprah sambungan air PDAM baru dengan biaya Rp 1,95 juta.

Baktiyasa menyatakan pihaknya mengupayakan dengan memasok dari sumber mata air lainnya yakni dengan membagi pasokan dari mata air Embukan, Ababi. Hal ini

untuk membantu sekitar 4.000 pelanggan air PDAM di Seraya dan sekitarnya.

Baktiyasa mengatakan, terkait kerusakan sop starter mesin pompanya di Ujung Hyang, pihaknya sudah memanggil rekanan untuk memperbaikinya. Namun pihak rekanan mengatakan suku cadangnya rusak dan mesti diganti namun tak ada di Indonesia. Karena itu, mesti diimpor dari luar negeri. Terkait kondisi itu, tambah Baktiyasa, dia menyampaikan permakluman kepada warga di Karangasem pelanggan PDAM yang kebetulan aliran airnya

macet. Soalnya, memang ada kerusakan, sebagai akibat mesin pompa sudah agak tua dan perlu perbaikan. Perbaikan sop starter itu diperkirakan paling cepat dua minggu dan paling lama sebulan.

Namun, dia meyakini pasokan air tak bakal macet lama, karena sudah diupayakan pasokan dari sumber mata air Embukan, yang selama ini dipakai memasok ke Kota Amlapura serta ke Manggis. Untuk pasokan ke wilayah Asak dan Timbrah, karena lokasinya tinggi, dilakukan pasokan secara bergilir. (013)



# Pembangunan Terminal Kargo Manfaatkan Tanah Telantar

Negara (Bali Post) -

Tanah telantar seluas tiga hektar di Gilimanuk dirancang dijadikan Terminal Kargo. Bahkan rencana ini tinggal menunggu realisasi anggaran dari Pemerintah Pusat. DED (*Detail Engineering Design*) sudah rampung dan kini menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menggarap kawasan penyangga.

Ketua DPRD I Ketut Sugiasa, Selasa (31/3) kemarin mengatakan dari hasil konsultasi terakhir dengan Kementerian Perhubungan, dipastikan tanah lokasi pengurusan permukiman yang kini telantar itu akan dijadikan Terminal Kargo. Rencana ini dengan pertimbangan adanya lahan telantar seluas 3,5 hektar dan persoalan kecelakaan lalu lintas akibat truk

melebihi muatan. "Sangat disayangkan lahan sebegitu luas terbengkalai," tandas Sugiasa.

Melalui koordinasi dengan eksekutif lahan itu diusulkan menjadi Terminal Kargo dan dari Kementerian Perhubungan ada sinyal positif. Rencana awal memang ada usulan penambahan lahan yang masuk kawasan TNBB (Taman Nasional Bali Barat)

dan dari koordinasi terakhir ke Kementerian Kehutanan, permohonan itu ditolak.

Menurutnya ada perbedaan pemahaman, karena sejatinya lahan untuk Terminal Kargo sudah tersedia. Semestinya lahan di kawasan TNBB itu yang dimohonkan adalah untuk penunjang pariwisata. Seperti dengan rest area serta penataan sekitar lokasi Terminal Kargo. Dalam

waktu dekat Dewan akan berkoordinasi dengan TNBB terkait zona-zona yang bisa dimanfaatkan untuk penunjang pariwisata terpadu di Gilimanuk.

Pihaknya yakin dengan berkembangnya kawasan Gilimanuk, dampaknya pada perekonomian masyarakat sekitar. "Sekarang menjadi tanggung jawab Pemkab untuk penataan sekitar," tandas Sugiasa. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi kepada wartawan mengatakan untuk mewujudkan Terminal Kargo membutuhkan

anggaran Rp 48 miliar.

Dana itu dari APBN dan pemerintah daerah berharap bisa dialokasikan pada APBN Perubahan 2015. Usulan pemanfaatan lahan telantar itu sudah dilakukan sejak tahun 2014. Sejumlah persyaratan sudah dipenuhi seperti gambar detail bangunan, kajian hingga penyediaan lahan. Lahan seluas 3,5 hektar saat ini merupakan lahan kosong yang sebelumnya sempat digunakan untuk permukiman warga. Tujuan disediakan Terminal Kargo salah satunya untuk menurunkan barang truk yang melebihi muatan. (kmb26)

Edisi : Rabu, 1 April 2015

Hal : 14



**Terpidana Kasus Art Center Belum Dieksekusi**

# Preseden Buruk Penegakan Hukum di Bali

BELUM dieksekusinya dua terpidana kasus Art Center, Ketut Suastika dan Ketut Mantara Gandi, membuat praktisi hukum di Bali kecewa terhadap penegakan hukum di Bali. Kejadian ini dinilai akan menjadi preseden buruk penegakan hukum di Bali.

"Ini berarti Kejari (Kejaksaan Negeri) Denpasar dan JPU (jaksa penuntut umum) dari Kejati (Kejaksaan Tinggi) Bali lemah. Keputusan hakim dan sudah *inkracht*, kok belum dieksekusi. Ini aneh sekali, apalagi alasannya hanya ada upacara agama. Terus terang saya sangat kecewa," tegas praktisi hukum Putu Suyantha, S.H., M.H., Selasa (31/3) kemarin.

Kecurigaan akan sulitnya kedua terpidana ini dijebloskan ke sel, sudah tercium sejak awal. Saat ditetapkan sebagai tersangka, keduanya tidak ditahan. Ketika kasusnya sudah masuk proses persidangan, kedua terpidana ini menjalani tahanan kota. Ketika telah divonis, belum juga dieksekusi. "Sebagai eksekutor, JPU tidak boleh melawan undang-undang dan harus melaksanakan eksekusi. Ini salah satu bukti penegakan hukum di Bali tajam ke bawah tumpul ke atas," ujarnya.

Carut-marutnya proses penegakan hukum di Bali, lanjut Suyantha, aparat pen-

egak hukum harus berbenah, bukan sebaliknya. Karena ternyata, harapan masyarakat agar penegakan hukum seadil-adilnya, belum bisa terwujud. "Sekali lagi saya tegaskan, ini preseden buruk penegakan hukum di Bali. Patut diduga, kejaksaan main mata dengan terpidana tersebut sehingga terus diulur-ulur. Kalau orang kecil diuber-uber seperti teroris, jika pejabat, mereka (jaksa - red) tak berdaya," kata praktisi asal Mengwi, Badung ini.

Hal senada diungkapkan akademisi I Gede Wirata, S.Sos., S.H., M.H., MAP. "Seperti itulah penegakan hukum kita, bersifat subjektif sekali. Kekuasaan sangat berpengaruh terhadap hukum di Indonesia," tegasnya.

Wajar saja, lanjut Wirata, bila masyarakat awam curiga ada sesuatu di balik itu semua. Apalagi, kedua terpidana sangat "diistimewakan". "Beda halnya seperti kasus nenek mencuri kayu yang ramai dibicarakan saat ini. Beralih sudah masuk ranah hukum, prosesnya tetap lanjut," ujar Wirata sembari menambahkan, jangan sampai adanya kejadian ini menimbulkan kecurigaan-kecurigaan berlebihan.

Kasus dugaan korupsi pengadaan *sound system*, *lighting*, dan CCTV di Art Center Denpasar pada 2013 lalu menetapkan dua tersangka,

yakni Ketut Mantara Gandi dan Ketut Suastika. Suastika ditetapkan sebagai tersangka pada 13 September 2013, sedangkan Mantara Gandi beberapa bulan sebelumnya.

Mereka kemudian mendapat perlakuan istimewa, yaitu ditetapkan menjadi tahanan kota pada 3 November 2014. Setelah menjalani proses persidangan cukup panjang, Ketut Suastika divonis bersalah melakukan korupsi oleh majelis hakim pimpinan Cening Budiana. Mantan Kadisbud Pemprov Bali ini divonis 14 bulan penjara dikurangi selama menjalani tahanan kota pada 16 Maert 2015. Sedangkan Mantara Gandi divonis 13 bulan penjara.

Namun, Kejari Denpasar dan JPU dari Kejati Bali seperti tak berdaya dalam kasus Art Center. Walau putusannya sudah *inkracht* pekan lalu, eksekusi terhadap kedua terpidana kasus Art Center, Ketut Suastika dan Ketut Mantara Gandi, Senin (30/3) lalu gagal dilakukan. JPU Made Tangkas mengatakan, eksekusi batal dilaksanakan karena ada permintaan dari kuasa hukum terpidana. Disebutkan, kedua terpidana saat itu sedang ada upacara agama dan mohon penundaan eksekusi. Mereka menyatakan siap dieksekusi, 6 April mendatang. Kita tunggu, saja! (rah)

Edisi : Rabu, 1 April 2015

Hal : 3